

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengenai Faktor – Faktor Sosial yang Menghambat Pencegahan Banjir di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh Kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Sosial Penghambat Pencegahan Banjir di Kelurahan Petogogan meliputi kebiasaan bermukim di Bantaran Sungai yang merupakan hambatan kultural. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial ekonomi pada penduduk sekitar Kali Krukut. Dan yang terakhir yaitu sikap pasrah terhadap lingkungan.
2. Perilaku Masyarakat yang Menghambat Pencegahan Banjir meliputi individualisme yang merupakan karakter dari masyarakat perkotaan. Selanjutnya rendahnya kesadaran dan kebiasaan dari warga sekitar. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan warga sekitar yang membuang sampah rumah tangga di Kali Krukut.

Secara keseluruhan, hambatan ini menunjukkan adanya dualitas timpang antara struktur (pemerintah, kebijakan) yang belum sepenuhnya memberdayakan, dan agen (masyarakat) yang mereproduksi kebiasaan kontraproduktif, menciptakan siklus kegagalan dalam pencegahan banjir di Petogogan.

4.2 Saran

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih menyempurnakan penelitian ini dengan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Kelurahan Petogogan.

Masyarakat diharapkan dapat mulai mengubah pola pikir individualistis menjadi semangat kebersamaan. Mengaktifkan kembali kegiatan kerja bakti atau gotong royong secara rutin dapat menjadi langkah awal untuk membangun tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Selain itu, perlu adanya kesadaran dari setiap individu untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai dan saluran air. Masyarakat dapat secara proaktif mengelola sampah rumah tangga dengan lebih baik dan saling mengingatkan antarwarga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, masyarakat diharapkan tidak hanya bersikap pasif dan menunggu bantuan, tetapi juga aktif berinisiatif dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif kepada pihak pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah disarankan untuk tidak hanya fokus pada program yang bersifat *top-down*, tetapi juga secara aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pencegahan banjir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mendengarkan dan merealisasikan aspirasi warga, seperti usulan normalisasi sungai, dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik. Diperlukan juga penegakan aturan tata ruang secara tegas dan konsisten terkait sempadan sungai. Namun, penertiban bangunan liar harus diimbangi dengan penyediaan solusi hunian yang layak dan terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah agar tidak menimbulkan masalah sosial baru. Pentingnya program edukasi mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga fungsi sungai juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan dapat diubah menjadi lebih dialogis dan berbasis komunitas.